



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOHANES WIDIJANTORO
2. Jabatan : ANGGOTA OMBUDSMAN RI
3. NHK : 854800

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 802.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m²/48 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 448.000.000
2. Tanah Seluas 50 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 8 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 24.000.000
4. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 334.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, TOYOTA HARRIER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 263.818.453**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.400.318.453



III. HUTANG

Rp. 173.945.312

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.226.373.141

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.